Retorik • *Vol. 10(2), 2022*
DOI: 10.24071/ret.v10i2.5868

p-ISSN: 1412-6932
e-ISSN: 2549-2225

Data Activism di Masa Pandemi: Peran dan Tantangan Lapor Covid-19 dalam Advokasi dan Pengawasan Kebijakan Penanganan Covid-19 di Indonesia

Najib Zahro'u
Magister Kajian Budaya, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, Indonesia
E-mail: nzahrou@gmail.com

Abstrak

Artikel ini hendak melihat sejauh mana peran platform Lapor Covid-19 dalam memperluas keterlibatan sipil pada saat negara fokus pada penanganan pandemi di Indonesia. Platform ini merupakan salah satu bentuk respons terhadap kebijakan-kebijakan penanganan pandemi di Indonesia khususnya yang terkait dengan data. Lapor Covid-19 sebenarnya berperan multisektor antara lain pengawasan kebijakan pandemi, advokasi hak-hak tenaga kesehatan, tuntutan keterbukaan data pandemi, serta memberikan alternatif data terkait Covid-19 di lapangan kepada pemerintah. Artikel ini akan mencoba mengulas sejauh mana seluruh aktifitas yang dilakukan oleh Lapor Covid-19 dapat memengaruhi kebijakan pemerintah pusat saat penanganan pandemi. Artikel ini disusun dengan metode analisis data yang berasal dari rilis dokumen Lapor Covid-19*,* data-data yang masuk ke kanal platform, wawancara dengan tenaga kesehatan serta dari sumber-sumber digital lainnya. Seluruh data akan dianalisis dalam kerangka dinamika *data activism* di negara-negara Global South. Hasilnya adalah keberhasilan Lapor Covid-19 dalam memberikan rekomendasi terhadap kebijakan penanganan pandemi di Indonesia, ternyata tetap menemukan celah-celah yang membuat gerakan tersebut kurang efektif seperti peretasan di berbagai kanal platform, resistensi pemerintah terhadap data yang disodorkan, belum meratanya sosialisasi terhadap kanal Lapor Covid-19, dan situasi politik global yang berkaitan dengan ketimpangan penanganan pandemi.

Kata kunci: Lapor Covid-19, *data activism*, pandemi

Data Activism during Pandemic Times: Roles and challenges of Lapor Covid-19 in advocating and monitoring policies for handling Covid-19 in Indonesia

Abstract

This article wants to look at the role of the Lapor Covid-19 platform in expanding civic engagement at a time when Indonesian's government was focused on

handling the pandemic. This platform was a response to policies for handling the pandemic in Indonesia, especially those related with data. Lapor Covid-19 actually has a multi-sectoral role; including monitoring pandemic policies, advocating for the rights of health workers, demands for transparency of pandemic data, and providing alternative data related to Covid-19 in the field to the government. This article will try to review the extent to which all activities carried out by Lapor Covid-19 can influence central government policies when handling a pandemic. This article was compiled using the data analysis method that comes from the release of the Lapor Covid-19 document, data that enters the platform channel, interviews with health workers and from other digital sources. All data will be analyzed within the framework of the theoretical framework of data activism in the Global South. The result is the success of Lapor Covid-19 in providing recommendations on policies for handling the pandemic in Indonesia, but it still finds 'fragility' that make the movement less effective, such as hacking on various platform channels, the government's resistance to the data that is offered, the un-massive socialization of the Lapor Covid-19, as well as the global political situation related to the imbalance in the handling of the pandemic.

Keywords*: Lapor Covid-19, data activism, pandemic*

Lapor Covid-19 dan Respons Terhadap Penanganan Pandemi di Indonesia

Kita mencatat bahwa kasus pertama Covid-19 di Indonesia diumumkan pada tanggal 2 Maret 2020. Pada saat itu dunia sudah masuk pada fase pandemi tahap awal yang mengharuskan pemerintahan negara manapun untuk waspada dalam menghadapi gelombangnya. Setelah kasus pertama ditemukan, ternyata tidak membutuhkan waktu lama untuk masuk ke kasus kedua, ketiga, dan seterusnya. Tercatat bahwa pada awal April 2020 pasien yang terkonfirmasi positif Covid-19 sudah mencapai ribuan. Hal ini menuntut kesigapan pemerintah dalam menghadapi wabah yang sudah di depan mata.

Respons pemerintah bisa dibilang terlambat dalam fase-fase awal pandemi.[1] Di sini bisa kita lihat dan ingat bahwa pemerintah tidak segera menyiapkan kebijakan di bidang kesehatan guna menekan laju penyebaran virus seperti tes Covid-19 secara massal, prosedur isolasi, dan lain sebagainya. Justru pemerintah lebih memfokuskan perhatiannya pada kekhawatiran muncul-

[1] Ibnu Nadzir, "Data Activism and Covid-19 in Indonesia," *Jurnal Kependudukan Indonesia (Edisi Spesial: Demografi dan COVID-19)*, Juli 2020, 1–2.

nya dampak ekonomi yang terbawa akibat pandemi.[2] Akibat pemerintah tidak segera melakukan mitigasi wabah sehingga berdampak pada laju konfirmasi kasus positif yang semakin meningkat dari hari ke hari.

Jatuhnya korban tidak hanya dari pasien melainkan juga dari tenaga kesehatan yang harus menjalankan tugas dengan fasilitas yang minim dan seadanya. Tercatat bahwa sampai dengan April 2020, sudah ada 24 dokter dan 6 perawat yang meninggal dunia akibat Covid-19.[3] Pada tahap ini ada lembaga swadaya masyarakat yang mulai bersuara terkait kebijakan penanganan pandemi yang sekadarnya oleh pemerintah tersebut. Inisiatif datang dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Akuntabilitas Penanganan Covid-19. Selepas datang banyak suara-suara tuntutan untuk penanganan pandemi secara lebih serius, pemerintah mulai bergerak dalam menangani wabah.

Penanganan pandemi oleh pemerintah diawali dengan pembentukan Satuan Tugas Covid-19 yang bertugas membawahi satuan tugas di tingkat yang lebih rendah yakni kabupaten dan kota. Yang menjadi fokus dari satuan tugas tersebut adalah pencatatan, pelaporan, dan *tracking* pasien yang terkonfirmasi positif Covid-19. Pada momen tersebut mungkin kita masih ingat betul data-data soal pasien covid-19 pasti akan di-*share* secara *up to date* oleh Satgas Covid-19. Data-data ini selanjutnya menjadi bahan bagi pemerintah untuk melakukan penanganan tahap lanjutan kepada mereka yang terkonfirmasi Covid-19.

Sayangnya, data yang dikumpulkan oleh pemerintah jauh dari akurasi yang maksimal. Di luar data resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah, ternyata jumlah orang yang terkonfirmasi Covid-19 jauh lebih besar. Awalnya hal ini tidak disadari langsung oleh pemangku kebijakan. Hal inilah yang melatarbelakangi kemunculan sebuah platform pelaporan warga yang bernama Lapor Covid-19.[4] Platform tersebut menjadi semacam alternatif bagi publik untuk melihat data 'sebenarnya' jumlah orang yang terkonfirmasi positif covid-19 di Indonesia.

Pada tahap selanjutnya, platform Lapor Covid-19 tidak hanya memberi-

---

[2] Koalisi Masyarakat Sipil untuk Akuntabilitas Penanganan Covid-19, "Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penanganan Pandemi," 2021, 2, https://laporcovid19.org/post/transparansi-dan-akuntabilitas-dalam-penanganan-pandemi.

[3] Data dari Ikatan Dokter Indonesia dan PPNI, dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Akuntabilitas Penanganan Covid-19, hlm. 3.

[4] "Tentang kami", Lapor Covid-19. https://laporcovid19.org/tentang-kami/. Diakses pada 24 Desember 2022.

kan data alternatif terkait pandemi tetapi juga memberikan advokasi kepada tenaga kesehatan yang tidak mendapatkan haknya semasa bertugas. Lapor Covid-19 juga menjadi alat pengawasan sipil terhadap kinerja pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19. Terutama yang menjadi sorotan adalah keterbukaan data dan juga anggaran ketika penanganan wabah. Hal ini menjadi sorotan banyak orang karena di masa gawat darurat sangat rawan terjadi penyalahgunaan wewenang maupun potensi korupsi, apalagi saat aktivitas publik berkurang drastis sehingga keterbukaan informasi semakin minim.[5] Semua ketidakberesan penanganan pandemi tersebut oleh Lapor Covid-19 dibagikan kepada publik melalui media sosial dan website.

Platform Lapor Covid-19 membuat kanal website tersendiri dengan URL laporcovid19.org. Selain di kanal website, beberapa akun sosial media di Twitter dan Instagram juga dibuat. Di kanal dan sosial media tersebut semua informasi soal data terkonfirmasi positif Coronavirus, perkembangan pencairan insentif nakes, *bed* kosong untuk perawatan covid-19 dibagikan kepada publik secara terbuka. Lapor Covid-19 secara khusus juga mengadvokasi berbagai kebijakan turunan yang diproduksi selama pandemi di Indonesia. Kebijakan-kebijakan tersebut dikritisi lewat berbagai publikasi dan diskusi secara daring dengan mengundang pakar di bidangnya.

Kehadiran Lapor Covid-19 di tengah carut-marutnya kebijakan penanganan pandemi adalah fenomena yang unik. Sebab kemunculannya membawa pengaruh yang tidak sedikit terhadap kebijakan penanganan pandemi oleh pemerintah. Data-data yang dikumpulkan oleh Lapor Covid-19 menjadi data alternatif terhadap versi resmi yang dikeluarkan pemerintah. Di satu sisi, pemerintah terbantu karena dengan adanya versi data yang lain bisa menjadi acuan untuk merevisi kebijakannya. Namun, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Akuntabilitas Penanganan Covid-19 kembali merilis temuannya bahwa sampai setahun pandemi berjalan, banyak kebijakan pemerintah masih salah arah dan tidak tertarget.[6] Hal ini patut menjadi pertanyaan serius karena partisipasi oleh LSM dan sipil seperti platform Lapor Covid-19 belum banyak mendapatkan perhatian dari pemerintah sehingga selama satu tahun penanganan pandemi masih terkesan asal-asalan. Di sini akan dibahas mengenai bagaima-

[5] Habib Muhammad Shahib dkk., "Akuntabilitas Dan Transparansi Anggaran Pemerintah Di Era Covid-19 Pada Website Pemerintah Daerah Se-Indonesia," *Jurnal Transformative* 8, no. 1 (2022): 104, https://doi.org/10.21776/ub.transformative.2022.008.01.5.

[6] Koalisi Masyarakat Sipil untuk Akuntabilitas Penanganan Covid-19, "Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penanganan Pandemi," 1.

na dan sejauh mana kehadiran Lapor Covid-19 mampu menggandeng pemerintah untuk lebih mengarahkan kebijakan pandeminya agar pro rakyat.

Kajian Teori

Artikel ini hendak mencari keterlibatan dan peran platform Lapor Covid-19 sebagai medium pengawasan sipil terhadap kebijakan pemerintah dalam menangani Covid-19. Penulis berasumsi bahwa kehadiran platform ini di saat pandemi merupakan sebentuk aktivisme digital dengan spesialisasi pada *data activism.* Kita sepakat bahwa aktivisme digital hadir sebagai salah bentuk mutakhir dari *political activism*.[7] Melalui platform digital, masyarakat kemudian bisa berpartisipasi langsung dalam menentukan atau mengkritisi arah kebijakan pemerintah. Platform Lapor Covid-19 di tahun pertama pandemi memang lebih memfokuskan diri untuk menjaring data-data terkonfirmasi positif Covid-19 dari seluruh Indonesia untuk disodorkan kepada pemerintah guna perluasan penanganan pandemi. Data-data ini didapatkan oleh tim Lapor Covid-19 dari laporan warga dan komunitas yang terdampak Coronavirus secara langsung.

Melalui pemanfaatan teknologi ini kemudian Lapor Covid-19 muncul menjadi salah satu 'gerakan' atau *movement* yang cukup diperhitungkan karena mempunyai spesialisasi khusus di bidang data. *Data activism* yang dijalankan oleh suatu lembaga, menurut Milan dan Guttierrez biasanya meliputi beberapa agenda di antaranya: membentuk identitas kolektif, komunikasi, mobilisasi opini, dan aksi langsung.[8] Dari beberapa kriteria tersebut, Lapor Covid-19 menjalankan kesemuanya kecuali melakukan aksi demonstrasi secara langsung. Pembentukan identitas kolektif dengan merangkul dan mengadvokasi semua elemen yang terkena dampak langsung dari Coronavirus terutama pasien dan juga tenaga kesehatan. Komunikasi dijalankan melalui berbagai salurannya dengan pemangku kebijakan dan juga warga di lapangan. Lalu, mobilisasi opini ini dilakukan melalui berbagai media baru seperti *website*, Instagram, dan Twitter. Mobilisasi opini tersebut dilakukan untuk mengkritisi dan mencari solusi atas kebuntuan pemerintah dalam menangani

[7] Sebastian Kaempf, "The Digital Divide: Scarcity, Inequality and Conflict (Last Moyo) Case Study: Virtual Wars," dalam *Digital Culture: Understanding New Media: Understanding New Media*, ed. oleh Creeber Glen dan Martin Royston (Berkshire: Open University Press, 2009), 128.

[8] Miren Gutiérrez, *Data Activism and Social Change* (London: Palgrave Macmillan, 2018), 63.

pandemi.

Poin penting bagi keberlangsungan gerakan aktivisme berbasis data yang dijalankan oleh Lapor Covid-19 ini adalah sinerginya dengan pemerintah atau aparatus yang berkuasa di saat pandemi. Di sini, meminjam istilah dari Chantal Mouffe, 'gerakan sosial baru' harus mampu melakukan *Critique as Engagement*.[9] Berdasarkan kesimpulan Mouffe, bahwa gerakan sosial baru harus mampu mewadahi kepentingan dari berbagai macam golongan di saat bersamaan. Gerakan sosial juga harus mampu berkompromi tidak hanya dengan pihak internalnya tetapi juga dengan pihak eksternal. Kompromi yang dimaksud adalah dengan bekerja sama dalam kadar tertentu dengan *state* atau pemerintahan. Di sini, bukan berarti gerakan sosial lebur ke dalam wacana yang digaungkan oleh pemerintah. Justru di sinilah gerakan sosial harus mampu menjadi pembawa wacana alternatif melalui keterlibatannya atau persentuhannya dengan mereka yang mempunyai *power* alias *state* tersebut.[10] Praktik keterlibatan gerakan sosial dalam segala kebijakan ini juga harus dirumuskan secara matang-matang. Sebab, gerakan sosial tidak lagi bisa menganggap musuhnya sebagai sesuatu yang tunggal, semisal pemerintahan secara umum. Menurut Mouffe, hal itu terlalu abstrak dan tidak mampu menjawab perkembangan terbaru dari masyarakat global saat ini. Sebab, menurut Mouffe, dunia saat ini telah terkontrol oleh sebuah mekanisme kapitalis global yang mengatur tidak hanya melalui alat berupa negara melainkan juga melalui internet dan sistem perdagangan global yang kompleks.[11]

Untuk memudahkan mobilisasi gerakan sosial ini, diperlukan analisis yang memadai terhadap tuntutan yang ingin disuarakan. Jadi gerakan sosial di era baru ini lebih terfragmentasi berdasarkan isu-isu yang sedang berkembang. Melalui hal tersebut, gerakan sosial akan lebih mudah untuk mengartikulasikan tuntutannya untuk transformasi kebijakan yang lebih pro rakyat. Untuk menuju ke sana, gerakan sosial harus senantiasa menjalankan beberapa trik, antara lain menjaga komunikasi antargerakan sosial yang lain, partai politik, dan serikat buruh.

Tentunya langkah ini tidak mudah untuk dijalankan. Apalagi, jika gerakan sosial yang hendak terlibat dalam setiap isu kebijakan yang dijalankan pemerintah gagal berkontestasi dengan wacana arus utama. Hal ini menjadi

---

[9] Chantal Mouffe, "The Importance of Engaging the State," dalam *What Is Radical Politics Today?*, ed. oleh Jonathan Pugh (London: Palgrave Macmillan, 2009), 230–37, https://doi.org/10.1057/9780230251144_27.

[10] Mouffe, 235.

[11] Mouffe, 231.

tantangan bagi gerakan sosial baru ini karena hegemoni dalam arena tersebut cukup kuat sehingga diperlukan modal yang tidak sedikit. Termasuk bagi platform Lapor Covid-19 yang harus menjalankan peran *engaging to the state* tersebut. Namun, platform tersebut juga tidak diperkenankan lebur ke dalam narasi hegemoni di masyarakat. Penyebabnya adalah bahwa platform Lapor Covid-19 di sini selain menjalankan peran advokasi juga sebagai wadah untuk artikulasi politik dari banyak unsur dalam masyarakat dengan segala perbedaan pandangannya. Namun, wadah artikulasi politik juga tak diperkenankan berfungsi sebagai homogenisasi pendapat. Praktik kontra hegemonik, menurut Mouffe, tak boleh serta merta menghilangkan perbedaan pendapat dalam gerakan. Gerakan justru hadir sebagai sebuah ansambel perbedaan yang hanya pada satu waktu tertentu melawan atau mengkritisi dominasi kekuasaan yang ada.[12] Dalam hal ini dominasi kekuasaan tak terbatas pada pemerintah yang eksis di sebuah negara. Dalam tata kapitalisme global, dunia sudah saling terkoneksi satu sama lain; apa yang menjadi kebijakan banyak negara saat ini sedikit banyak merupakan kepanjangan kepentingan dari dinamika kapitalisme global.

Hal tersebut terkadang tidak disadari oleh pemangku kepentingan di sebuah negara. Dalam kasus pandemi Covid-19, kebijakan *lockdown* atau yang dalam konteks Indonesia diadopsi secara parsial dengan sebutan PSBB (Pembatasan Sosial Skala Besar) justru membuat perekonomian masyarakat kelas menengah ke bawah semakin terhimpit karena kebanyakan dari mereka bersandar pada basis ekonomi informal yang tidak ada jaminan dari negara sepenuhnya.[13] Selain itu, jika mereka memaksakan untuk 'keluar rumah' untuk bekerja, hal itu juga menjadi riskan karena bayangan penyebaran virus masih mengintai di depan mata tanpa vaksinasi covid-19.

Satu hal yang perlu kita tahu adalah bahwa proses untuk menuju vaksinasi secara massal tersebut juga masih menjadi angan-angan utama negara-negara *Global South.* Permintaan akan vaksin yang tinggi dari penjuru dunia menyebabkan pemerintah berbagai negara mulai melakukan perburuan vaksin. Bagi negara-negara *Global South* yang ingin mengakses vaksin dan alat tes Covid-19 perlu memberikan memberikan jaminan kepada Bank Dunia. Penyebabnya adalah bahwa sebelumnya Bank Dunia telah memberikan suntikan dana sebesar 12 miliar US Dolar kepada produsen farmasi khusus bagi

[12] Mouffe, 237.

[13] Toby Green, *The Covid Consensus: The New Politics of Global Inequality* (London: Hurst, 2021), 159.

negara berpengasilan rendah.[14]

Pada akhirnya terjadilah kelangkaan vaksin di berbagai negara *Global South*, tidak terkecuali Indonesia. Kita tahu bahwa di awal akhir tahun 2020 dan awal tahun 2021 vaksin masih terbatas peruntukannya untuk para tenaga kesehatan di berbagai rumah sakit dan instansi. Langkanya vaksin membuat pemerintah perlu merumuskan skala prioritas penerima vaksin. Hal ini juga menjadi perhatian platform Lapor Covid-19. Sebagai sebuah gerakan berbasis digital dan data, platform ini benar-benar menekankan perluasan vaksin kepada para tenaga kesehatan di seluruh Indonesia. Hal ini dikarenakan masih banyak tenaga kesehatan di beberapa wilayah Indonesia belum divaksin pada awal tahun 2021 sehingga membuat pekerjaan mereka menjadi beresiko. Dalam hal ini, peran platform Lapor Covid-19 adalah sebagai gerakan yang berusaha menggunakan pendekatan *Engaging to the State.* Para tenaga kesehatan dapat melakukan aduan dan pelaporan terkait hak mereka ketika negara sedang berjibaku dengan situasi global pandemi yang menghimpit. Sebagai sebuah gerakan berbasis digital, Lapor Covid-19 juga tidak luput dari kelemahannya dalam memasifkan pengaruhnya di Indonesia. Kelemahan gerakan tersebut terjadi terutam karena kurang meratanya infrastruktur internet di Indonesia.[15] Sebagai sebuah gerakan berbasis digital, platform Lapor Covid-19 harus berada dalam sebuah ekosistem internet yang merata apabila ingin mendapatkan pengaruh yang luas hingga penjuru Indonesia. Namun, hal ini menjadi kendala pertama bagi platform tersebut sehingga memungkinkan tidak semua orang di Indonesia mengetahuinya.

Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan memakai pendekatan analisis gerakan sosial baru, terutama yang berkaitan dengan aktivisme data. Penulis berfokus pada konsepsi dari Mouffe terkait gerakan politik yang bersifat "*engaging to the state*". Di sini penulis menginventarisasi beberapa inisiatif pada platform Lapor Covid-19 dalam memperluas keterlibatan sipil agar bisa menentukan arah penanganan pandemi di Indonesia. Di

[14] Green, 26.

[15] Onno W. Purbo, "Narrowing the digital divide," dalam *Digital Indonesia: Connectivity and Divergence*, ed. oleh Edwin Jurriens dan Ross Tapsell (Singapore: ISEAS–Yusof Ishak Institute, 2017), 85, https://www.cambridge.org/core/books/digital-indonesia/narrowing-the-digital-divide/C724A274F97E57E951BF262BF8952085.

sini penulis membagi aktivisme yang dilakukan oleh Lapor Covid-19 menjadi dua yakni terkait data dan mobilisasi opini publik. Keduanya berjalan beriringan dan menjadi fokus dari platform Lapor Covid-19 semenjak dibentuk pada tahun 2020. Penulis melakukan penggalian data dari dokumen-dokumen publikasi Lapor Covid-19 serta dari beberapa wawancara dengan tenaga kesehatan yang berada di lapangan yang mengetahui betul kehadiran platform tersebut. Lalu hal yang terkait dengan mobilisasi opini publik dari Lapor Covid-19*,* penulis juga ikut serta langsung sebagai *audience* di berbagai diskusi publik yang digelar. Melalui keikutsertaan tersebut, penulis mencatat berbagai hal yang berkaitan dengan aktivitas Lapor Covid-19 dalam menyosialisasikan berbagai permasalahan seputar penanganan pandemi oleh pemerintah Indonesia.

Untuk menghindari menciptakan sebuah penelitian yang berupaya mengglorifikasi kehadiran platform Lapor Covid-19 pada saat pandemi di Indonesia, penulis juga menginventarisasi berbagai kendala internal maupun eksternal dari platform tersebut selama pandemi. Poin-poin kendala ini diharapkan dapat menjadi evaluasi terhadap gerakan sosial baru berbasis digital di Indonesia sehingga dapat semakin berkembang ke depannya.

Inisiatif Platform Lapor Covid-19 dalam Menjaring Data Alternatif dan Pengawasan Kebijakan Penanganan Pandemi di Indonesia

Lapor Covid-19 mulai terbentuk pada bulan April 2020 ketika kasus Covid perlahan menanjak naik di Indonesia. Tidak lain kehadiran dari platform ini adalah untuk merespons ketidaksesuaian data penderita Covid di lapangan dengan data versi resmi yang dirilis pemerintah. Platform ini dipelopori oleh beberapa jurnalis, praktisi kesehatan, dan berbagai elemen pergerakan lainnya. Di laman yang dikelolanya, Lapor Covid-19 mencantumkan beberapa nama seperti Ahmad Arif (Ketua Jurnalis Bencana dan Krisis), Irma Hidayana (Konsultan Independen Kesehatan Masyarakat), Budi Setyarso (Tempo), Cholil Mahmud (efek rumah kaca), Haris Azhar (hakasasi.id), Zen RS (Narasi TV), dan lain-lain. Apabila kita melihat beberapa nama pelopor tentu sudah tidak asing lagi dengan nama-nama tersebut. Utamanya, mereka adalah yang selama ini bergerak dalam literasi dan aktivisme digital di Indonesia. Platform ini secara resmi berada di bawah Yayasan Warga Berdaya untuk Kemanusiaan dengan kantor yang beralamat di Jakarta.

Sejak hadir pada bulan April 2020, platform ini terus menjadi pengawal dalam penanganan Covid-19 di Indonesia. Banyak agenda dari platform ini yang sudah masuk ke ranah aktivisme digital.

Dari Laporan Warga Menjadi Data Alternatif

Datafikasi dalam konteks ini merupakan salah satu metode pengumpulan data yang membuka peluang ke arah aktivisme politik.[16] Datafikasi ini menjadi penting dalam momen-momen tertentu, seperti pemilihan umum maupun dalam situasi khusus seperti pandemi Covid-19. Data ini berpeluang menjadi senjata keterlibatan publik dalam ikut serta mengambil kebijakan pemerintah karena data adalah obyektifikasi atas sebuah fenomena tertentu.

Kita bisa melihat keterlibatan Lapor Covid-19 dalam datafikasi pandemi juga sebagai salah satu bentuk aktivisme politik. Terutama datafikasi ini berjalan dari bawah ke atas atau *bottom up*. Hal ini menjadi alternatif dalam penanganan pandemi sebab selama awal pandemi kita mengetahui bahwa seringkali pemerintah gagal melakukan rekap dan pemetaan konfirmasi positif virus korona secara akurat. Hal ini bisa terjadi karena pemerintah memakai strategi pengumpulan data menggunakan mekanisme *top down*. Jadi datafikasi versi pemerintah adalah memanfaatkan data dari rumah sakit-rumah sakit di seluruh daerah setingkat kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Hal ini rawan dengan penyelewengan informasi sebab bisa saja data dan angka konfirmasi positif Covid-19 ditutupi atau justru dibesar-besarkan untuk tujuan-tujuan tertentu.

Peran Lapor Covid-19 dalam aktivisme data melalui pengumpulan data alternatif ini adalah untuk memberikan wacana tandingan atas arus utama data yang berpusat pada wacana pemerintah.[17] Penyusunan wacana tandingan ini penting sebab data yang tidak mempunyai epistemologis yang memadai tidak layak untuk dijadikan acuan dalam menyelesaikan problem, dalam konteks ini problem yang muncul dari pandemi Covid-19. Proses pengumpulan data yang dilakukan oleh platform Lapor Covid-19 adalah dengan memberikan fitur layanan dan aduan. Jadi siapapun yang menunjukkan gejala mirip Covid-19, baik yang dirawat di faskes maupun tidak, bisa mengisi aduan ter-

[16] Stefania Milan, "Political Agency, Digital Traces, and Bottom-Up Data Practices," *International Journal of Communication* 12 (2018): 507–27.

[17] Stefania Milan dan Lonneke van der Velden, "The Alternative Epistemologies of Data Activism," *Digital Culture & Society* 2, no. 2 (1 Desember 2016): 4, https://doi.org/10.14361/dcs-2016-0205.

sebut. Selanjutnya, data yang terkumpul tersebut direkap oleh sistem untuk menjadi data "padat" yang berisi informasi mengenai identitas dan keluhan dari penderita Covid-19. Melalui strategi ini sebenarnya Lapor Covid-19 berperan cukup krusial sebagai pilar datafikasi saat pandemi karena pada saat itu sistem datafikasi yang dijalankan pemerintah masih sangat terbatas dengan hanya mengandalkan faskes yang pada saat itu juga mulai menunjukkan tanda tanda kewalahan menghadapi situasi pandemi.

Pengaduan dan pencatatan yang dilakukan Lapor Covid-19 bisa saja menjadi perbandingan dengan data yang pemerintah hasilkan. Kemudian dari perbandingan ini bisa menjadi acuan untuk mengambil kebijakan tepat menangani pandemi. Namun, pada kenyataannya pemerintah juga tidak begitu menggubris data yang dihasilkan oleh Lapor Covid-19. Meskipun begitu, relawan-relawan yang menjalankan platform tersebut membuat banyak strategi baru untuk 'menghidangkan' data yang didapatkan kepada publik, misalnya dengan visualisasi data dan penggunaan data sebagai publikasi ilmiah yang dishare kepada public melalui media sosial.[18]

Mobilisasi Opini Publik lewat Beragam Kanal Media

Lapor Covid-19 tidak hanya berusaha menyodorkan data kepada pemerintah yang berwenang saja. Namun, data tersebut juga diusahakan untuk ditampilkan ke publik dalam bentuk yang sedetail dan semudah mungkin dipahami oleh masyarakat awam. Strategi yang dipakai untuk menyajikan data ini menurut pengamatan penulis melalui dua cara. Pertama sebagaimana pendapat Daniel Innerarity, yakni salah satunya melalui visualisasi data.[19] Visualisasi data ini meliputi beberapa unsur seperti *story telling*, *code writing*, *designing*, dan lain sebagainya. Cara yang dipakai oleh Lapor Covid-19 pada umumnya adalah memakai *story telling* dengan kombinasi desain infografis. Ini merupakan cara yang tepat untuk menghadirkan data dengan lebih mudah dibaca publik tetapi juga tetap menjaga akurasinya.

Artikulasi data oleh Lapor Covid-19 melalui strategi visualisasi data tersebut kemudian disebarluaskan melalui beragam kanal dan sosial media atau media baru. Ada tiga platform yang dipakai dan terus update hingga tulisan

[18] Website laporcovid19.org membuat publikasi-publikasi berbentuk artikel berbasis data seputar covid-19. Narasi yang dihasilkan dari publikasi tersebut berusaha memberikan kritik kepada pemerintah sekaligus mengedukasi publik soal penanganan pandemic covid-19.

[19] Gutiérrez, *Data Activism and Social Change*, 10.

ini ditulis yakni melalui *website*, Instagram, dan juga Twitter. Ketiganya menjadi medium bagi Lapor Covid-19 untuk menyebarluaskan data yang mereka susun dan dapatkan kepada publik yang membutuhkan. Publikasi yang dilakukan platform ini tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat umum saja melainkan juga bagi tenaga kesehatan seperti dokter dan perawat yang membutuhkan data *up to date* soal Covid-19.[20] Meskipun tidak semua data ditampilkan di laman resmi Lapor Covid-19, data yang diperlukan bisa kita *request*. Permintaan data ini tentunya hanya dapat dilakukan oleh instansi yang berwenang di suatu daerah untuk kepentingan penanganan pandemi Covid-19.

Lalu strategi komunikasi lain yang dijalankan oleh Lapor Covid-19 ini juga dalam bentuk penyelenggaraan diskusi publik dan *press releas*e resmi melalui *Zoom Meeting*. Penulis sempat mengikuti diskusi publik yang diinisiasi oleh platform tersebut dengan tema besar kebijakan penanganan pandemi yang militeristik. Melalui diskusi publik ini diharapkan dapat menjadi sarana bagi masyarakat untuk mengaspirasikan pendapatnya selama ini di ruang publik terkait penanganan Covid-19. Biasanya diskusi dengan tema-tema kebijakan Covid tersebut mengundang narasumber yang telah kompeten di bidangnya. Narasumber tidak hanya akan memaparkan opininya sendiri melainkan selalu ditandemkan dengan ahli di bidang kesehatan untuk *sharing* soal *update* terbaru dalam penanganan Covid-19. Diskusi-diskusi ini menjadi sarana edukasi publik sekaligus sebagai usaha intelektual bagi pengawasan kebijakan pemerintah.

Tentunya yang rutin dilaksanakan oleh platform ini selama pandemi adalah dengan menyelenggarakan *press release* resmi melalui Zoom. Momen pelaksanaan *press release* tersebut biasanya jatuh di saat ada perubahan penting dalam kebijakan penanganan pandemi di Indonesia. Dalam *press release* tersebut tentunya hadir juga ahli kesehatan untuk menjamin keabsahan *statement* yang dirilis ke publik.

Lapor Covid-19 telah menjalankan beragam strategi untuk memuluskan proyek *data activism* di masa pandemi di Indonesia. Tentunya beragam strategi tersebut harus kita lihat sejauh mana keberhasilannya dalam praktik pengawasan penanganan pandemi di Indonesia. Kalau kita hendak melihat sejauh mana keberhasilannya maka kita harus melihat bagaimana persentuhan platform tersebut dengan kebijakan pemerintah di masa pandemi Covid-19. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah produk aktivisme politik apa yang

[20] Wawancara dengan salah satu Tenaga Kesehatan (perawat) di Surabaya, pada 18 Desember 2022.

telah dihasilkan oleh Lapor Covid-19 yang sanggup membawa perubahan bagi kebijakan penanganan pandemi di Indonesia?

Penulis mengalami kesulitan menemukan data ketika hendak melihat sejauh mana publikasi dari Lapor Covid-19 sanggup mengubah arah kebijakan penanganan pandemi. Namun, ada data yang penulis temukan terkait advokasi yang dilakukan oleh Lapor Covid-19 selama pandemi berlangsung. Selama Lapor Covid-19 memulai aktivitasnya sejak bulan April 2020, setidaknya sudah ada sekitar 1027 laporan aduan yang masuk ke kanal tesebut. Laporan-laporan tersebut terdiri dari laporan warga, tenaga kesehatan, komunitas, dan masih banyak lagi.

Laporan yang masuk ke platform tersebut meliputi pelanggaran prokes, keluhan masyarakat, bantuan sosial, serta program vaksinasi. Dari sekian banyak laporan yang diterima oleh Lapor Covid-19 sudah ada 707 laporan yang terverifikasi dalam arti laporan tersebut layak untuk diteruskan ke pihak yang berwenang dalam hal ini pemerintah.[21] Dari semua laporan terverifikasi ada setidaknya 559 laporan yang diteruskan ke dinas atau kementerian terkait, terutama ke Kementerian Kesehatan. Total laporan yang terselesaikan dari yang masuk ke kementerian terkait adalah sebanyak 334 kasus dan yang belum mendapatkan balasan dari kementerian sejumlah 148 kasus. Dari sekian kasus yang mendapatkan perhatian dan yang tidak mendapatkan respons dari pemerintah ini bisa dibilang program advokasi yang dijalankan cukup berhasil. Namun, jika dikontekstualisasikan dengan beragamnya permasalahan akibat Covid-19 di Indonesia maka agenda advokasi Lapor Covid-19 masih terbilang minim. Tentunya keterbatasan tersebut mempunyai banyak faktor penyebab yang akan kita bahas di bawah ini.

Kendala dan Tantangan Lapor Covid dalam Menjalankan *Data Activism*

Biaya untuk menjalankan sebuah aktivisme digital memang tidak murah. Dalam kasus *data activism* di konteks masyarakat Barat, maka LSM akan menggaet perusahaan IT maupun korporasi yang bersedia menerima visi dan misi dari gerakan digital tersebut.[22] Namun, dalam konteks negara non-Barat,

[21] Diolah dari website Lapor Covid-19, https://laporcovid19.org. Diakses 25 Desember 2022.

[22] Dimitra L. Milioni dan Venetia Papa, "The Oppositional Affordances of Data Activism," *Media International Australia* 183 (2022): 50, https://doi.

potensi LSM untuk menggandeng korporasi guna melancarkan proyek aktivisme tersebut masih jarang terjadi. Alhasil, pelaku aktivisme masih mengandalkan independensinya serta jejaring mereka dengan aktivis dari sektor lain. Termasuk dalam fenomena *data activism* yang dilakukan oleh Lapor Covid-19 juga tidak mendapatkan dukungan yang memadai sehingga banyak kendala yang dialami selama menjalankan tugasnya.

Peretasan terhadap Medium Komunikasi

Peretasan yang diterima oleh pengelola platform Lapor Covid-19 terhitung sudah beberapa kali dialami. Yang tercatat tentu saja adalah peretasan saat *press conference* di bulan Mei 2020.[23] Pada saat itu kru Lapor Covid-19 hendak melaporkan perkembangan terbaru pada temuannya soal pandemi Covid-19 di Indonesia. Kemudian media yang digunakan untuk *press conference* tersebut yakni Zoom dibobol oleh hacker. Layar Zoom yang menjadi tempat pertemuan online sempat mengalami gangguan berupa suara-suara dalam bahasa Inggris, serta gambar-gambar yang mengganggu saat ditampilkan data terbaru perkembangan Covid-19.

Peretasan tersebut menyerang media-media yang digunakan untuk mempublikasikan perkembangan terbaru penanganan Covid-19. Tidak hanya percobaan peretasan via Zoom, tetapi juga melalui peretasan website dan media sosial. Karena hal ini, tim siber Lapor Covid-19 mulai memperkuat keamanan sibernya. Apalagi pada bulan Juni 2020 mulai santer terdengar berita adanya data pasien Covid yang dijual di *dark web* bernama *Rapidforums.* Data-data yang terkumpul oleh Lapor Covid-19 tentunya harus dalam keadaan aman ketika berhadapan dengan banyak potensi peretasan semacam ini. Meskipun tidak menimbulkan banyak kerugian dalam aktivitasnya, peretasan beberapa media ini membuat Lapor Covid-19 harus berhadapan dengan kejahatan dunia siber selain harus melakukan pengawasan terhadap kebijakan penanganan pandemi.

Resistensi Pemerintah Terhadap Data dan Fakta yang Disodorkan

Sebuah gerakan sosial baru mau tidak mau diharuskan untuk menjalin keterlibatan aktif dengan pemangku kebijakan di suatu negara. Dalam beberapa

org/10.1177/1329878X221074795.

[23] Disadur dari "Konferensi Pers Laporcovid-19 via Zoom Dua Kali Diretas", *Tempo*, 18 Mei 2022. https://koran.tempo.co/read/453095/konferensi-pers-laporcovid-19-via-zoom-dua-kali-diretas/

kasus, aktivisme digital mempunyai peran untuk menyediakan wacana-wacana baru yang segar untuk disodorkan kepada pihak yang berkuasa maupun untuk dikontestasikan dengan wacana hegemonik. Kemudian, yang menjadi permasalahan adalah ketika pemerintah yang berkuasa melihat aktivitas *data activism* tersebut sebagai sebuah ancaman sehingga mereka bertindak resisten terhadapnya. Inilah yang menjadi kendala bagi Lapor Covid-19 ketika hendak menjalankan fungsi aktivismenya dalam suasana pandemi Covid. Beberapa catatan berikut akan memperjelas resistensi pemerintah tersebut.

Pertama adalah terkait angka kematian tenaga kesehatan (nakes) di Indonesia yang cukup tinggi dan belum mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Di sini Lapor Covid-19 sudah mencatat sejak bulan Maret 2020 hingga Juli 2021 setidaknya sudah ada 1545 tenaga kesehatan yang meninggal akibat terpapar virus korona. Tingkat mortalitasnya berada di kisaran 0,136 hingga 5,32 per 1000 nakes.[24] Rasio kematian tertinggi ada di Provinsi Jawa Timur dan terendah di Sulawesi Barat. Tingginya angka kematian nakes ini patut menjadi perhatian pemerintah sebab tenaga kesehatan adalah garda terdepan dalam penanganan Covid-19. Data ini sudah disodorkan kepada pemerintah untuk dijadikan fokus perhatian dalam mencanangkan kebijakan. Namun, kenyataannya data dan laporan tersebut kurang mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Sehingga pada serbuan Covid-19 varian Delta pada tahun 2021 faskes di Indonesia secara keseluruhan hampir *collapse* karena tenaga kesehatan dan fasilitas yang ada tidak mampu menangani lonjakan pasien Covid-19. Bisa jadi hal ini terjadi tidak hanya karena pemerintah abai terhadap data yang disodorkan oleh Lapor Covid-19, tetapi juga faktor global terkait ketersediaan vaksin juga menghambat pemerintah untuk memproteksi tenaga kesehatan melalui vaksinasi agar senantiasa aman ketika menjalankan tugas. Dan fakta memang berbicara demikian sebab hingga serbuan varian Delta pada tahun 2021 tingkat vaksinasi dosis kedua untuk tenaga kesehatan masih minim dibandingkan negara-negara lain.

Hal kedua yang terkait dengan pengabaian pemerintah terhadap data dan rekomendasi yang disodorkan Lapor Covid-19 adalah terkait kebijakan pelaksanaan sekolah tatap muka yang mulai dijalankan pada awal tahun ajaran 2022. Lapor Covid-19 memberikan saran dan masukkan terhadap pemerintah melalui empat poin berikut ini antara lain: evaluasi terhadap kebijakan PTM

[24] Lenny L. Ekawati dkk., "Mortality among Healthcare Workers in Indonesia during 18 Months of COVID-19," *PLOS Global Public Health* 2, no. 12 (2022): e0000893, https://doi.org/10.1371/journal.pgph.0000893.

(pembelajaran tatap muka) di seluruh Indonesia, pelaksanaan monitoring terhadap PTM di semua sekolah, pelaksanaan PTM harus didasarkan pada data ilmiah terkait kesehatan, dan dasar-dasar pengendalian pandemi harus diterapkan selama PTM berlangsung.[25] Beberapa masukan dari Lapor Covid-19 tersebut didasarkan pada tingkat vaksinasi yang masih rendah terutama pada anak usia sekolah. Sampai awal tahun 2022, masih terdapat sekitar 13,5 juta anak belum mendapatkan vaksin dosis pertama yang padahal pembelajaran tatap muka sudah dilaksanakan secara bertahap. Lapor Covid-19 begitu menekan pemerintah untuk segera melakukan dan menerapkan rekomendasinya karena dikhawatirkan keteledoran bisa menyebabkan korban yang tak sedikit.

Cakupan Advokasi yang Terbatas

Kita bisa melihat peta sebaran aduan warga ke kanal Lapor Covid-19 berasal dari mana saja. Sampai tanggal 25 Desember 2022 tercatat daerah yang paling banyak memberikan aduan adalah dari wilayah Jawa Barat, lalu DKI Jakarta, dan diikuti Jawa Timur.[26] Untuk provinsi di luar Jawa yang paling banyak memberikan aduan adalah provinsi Sumatera Utara. Beberapa daerah bahkan tidak ditemukan aduan sama sekali seperti provinsi Gorontalo dan Maluku Utara. Data-data ini menunjukkan bahwa kehadiran platform ini masih sebatas di pulau Jawa khususnya di kota-kota besar yang terdampak Covid-19 paling parah. Keterbatasan cakupan advokasi platform ini memang menjadi pekerjaan rumah bagi kebanyakan *new social movement* di Indonesia. Akses informasi di banyak daerah di luar Jawa masih belum merata sehingga akses terhadap partisipasi dalam aktivisme digital pun juga belum maksimal.

Kita juga bisa melihat bahwa orang yang mengenal platform Lapor-Covid-19 ini juga baru sebatas kelas menengah perkotaan yang sudah melek digital. Kalangan masyarakat kebanyakan belum begitu akrab dengan platform aduan maupun sajian data *up to date* yang ditawarkan oleh platform Lapor Covid-19. Hal inilah yang menjadi sebab minimnya aduan yang masuk ke dalam kanal website mereka.

Tentu usaha yang dipelopori oleh Lapor Covid-19 dalam pengawasan kebijakan penanganan pandemi di Indonesia patut menjadi acuan bagi siapa

---

[25] Disadur dari "Lapor Covid-19 Berikan Empat Masukan Pada Pemerintah Terkait dilaksanakannya Kembali PTM", https://tribunnews.com/. Diakses pada 25 Desember 2022.

[26] Diolah dari laman https://laporcovid19.org/kanal-pengaduan/statistik-laporan-warga/ diakses pada 25 Desember 2022.

saja yang hendak membangun sebuah gerakan yang bersifat *engaging to the state*. Banyaknya kendala yang muncul seperti salah satunya yaitu resistensi dari pemerintah terhadap data dan rekomendasi yang diberikan oleh Lapor Covid-19 pun tidak hanya dialami di Indonesia. Salah satu yang menjadi kendala dalam penerapan *data activism* adalah ketidakmauan pemerintah untuk membuka data ke publik lalu membandingkan dengan temuan aktivis dengan alasan melindungi Big Data atau datafikasi mereka.[27] Ketidakmauan ini pada akhirnya membuat kebijakan penanganan pandemi berlangsung 'setengah hati' dan tidak terarah kepada kebijakan yang tepat sasaran.

Kesimpulan

Praktik aktivisme digital berbasis data yang dijalankan oleh Platform Lapor Covid-19 menjadi penyeimbang arus informasi dan wacana terkait kebijakan penanganan Covid-19. Usaha-usaha yang dijalankan oleh platform tersebut lewat pengumpulan, pelaporan aduan, penyodoran, serta penyajian data kepada publik menjadi sarana pengawasan terhadap arah kebijakan penganganan pandemi di Indonesia. Kunci keberhasilan dari gerakan digital dari Lapor Covid-19 sebenarnya adalah pertemuannya dengan negara atau *state*. Di sini Lapor Covid-19 bisa menjadi pemberi rekomendasi alternatif kepada pemerintah melalui temuan-temuan data yang dikumpulkannya. Terbukti, keberhasilan Lapor Covid-19 baru sebatas pada peran 'penyambung' aduan yang masuk ke kanal mereka. Lapor Covid-19 belum dapat secara penuh ikut menentukan arah dalam kebijakan penanganan Covid-19 di Indonesia. Penyebab hal ini tentu saja ada bermacam-macam, seperti banyaknya peretasan medium publikasi serta data server. Lalu kendala yang lain adalah faktor kondisi politik dan ekonomi global yang membuat pemerintah sulit untuk menjalankan berbagai rekomendasi dan data alternatif dari Lapor Covid-19. Tidak hanya itu, hal lain adalah masih terbatasnya cakupan area yang berhasil di-*cover* oleh platform tersebut. Pada akhirnya kita bisa menyimpulkan bahwa *data activism* di negara-negara non-Barat seperti Indonesia masih belum dapat keluar dari wacana hegemonik nasional dan global yang melingkupi mereka. Tukar menukar data dengan pihak berwenang sebagai suatu usaha untuk objektifikasi problem kemasyarakatan masih menjadi sesuatu yang langka sebab peme-

[27] Yu Sun dan Wenjie Yan, "The Power of Data From the Global South: Environmental Civic Tech and Data Activism in China," *International Journal of Communication* 14 (2020): 2144–62.

rintah pun tidak dengan mudah membuka data dan membagikannya kepada publik secara transparan. Hal inilah yang patut menjadi acuan untuk merevisi bagi Gerakan-gerakan digital selanjutnya yang berbasiskan data.

Daftar Pustaka

Ekawati, Lenny L., Ahmad Arif, Irma Hidayana, Ahmad Nurhasim, M. Zakiyuddin Munziri, Karina D. Lestari, Amanda Tan, dkk. "Mortality among Healthcare Workers in Indonesia during 18 Months of COVID-19." *PLOS Global Public Health* 2, no. 12 (9 Desember 2022): e0000893. https://doi.org/10.1371/journal.pgph.0000893.

Green, Toby. *The Covid Consensus: The New Politics of Global Inequality*. London: Hurst, 2021.

Gutiérrez, Miren. *Data Activism and Social Change*. London: Palgrave Macmillan, 2018.

Kaempf, Sebastian. "The Digital Divide: Scarcity, Inequality and Conflict (Last Moyo) Case Study: Virtual Wars." Dalam *Digital Culture: Understanding New Media: Understanding New Media*, disunting oleh Creeber Glen dan Martin Royston, 122–38. Berkshire: Open University Press, 2009.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Akuntabilitas Penanganan Covid-19. "Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penanganan Pandemi," 2021. https://laporcovid19.org/post/transparansi-dan-akuntabilitas-dalam-penanganan-pandemi.

Milan, Stefania. "Political Agency, Digital Traces, and Bottom-Up Data Practices." *International Journal of Communication* 12 (2018): 507–27.

Milan, Stefania, dan Lonneke van der Velden. "The Alternative Epistemologies of Data Activism." *Digital Culture & Society* 2, no. 2 (2016): 57–74. https://doi.org/10.14361/dcs-2016-0205.

Milioni, Dimitra L., dan Venetia Papa. "The Oppositional Affordances of Data Activism." *Media International Australia* 183 (2022): 44–59. https://doi.org/10.1177/1329878X221074795.

Mouffe, Chantal. "The Importance of Engaging the State." Dalam *What Is Radical Politics Today?*, disunting oleh Jonathan Pugh, 230–37. London: Palgrave Macmillan, 2009. https://doi.org/10.1057/9780230251144_27.

Nadzir, Ibnu. "Data Activism and Covid-19 in Indonesia." *Jurnal Kependudukan Indonesia (Edisi Spesial: Demografi dan COVID-19)*, Juli 2020, 105–8.

Purbo, Onno W. "Narrowing the digital divide." Dalam *Digital Indonesia: Connectivity and Divergence*, disunting oleh Edwin Jurriens dan Ross Tapsell, 75–92. Singapore: ISEAS–Yusof Ishak Institute, 2017. https://www.cambridge.org/core/books/digital-indonesia/narrowing-the-digital-divide/C724A274F97E57E951BF262BF8952085.

Shahib, Habib Muhammad, Muhammad Ridwan Hasanuddin, Yasmi Nurdin, Siprianus Palete, Fenny Mika, dan Reski Rahayu Saputri. "Akuntabilitas Dan

Transparansi Anggaran Pemerintah Di Era Covid-19 Pada Website Pemerintah Daerah Se-Indonesia." *Jurnal Transformative* 8, no. 1 (2022): 103–27. https://doi.org/10.21776/ub.transformative.2022.008.01.5.

Sun, Yu, dan Wenjie Yan. "The Power of Data From the Global South: Environmental Civic Tech and Data Activism in China." *International Journal of Communication* 14 (2020): 2144–62.